



LAPORAN PENELITIAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TUGAS BPK DALAM PEMERIKSAAN
PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PADA BUMN**

**OLEH
HENNYJULIANI, S.H. M.H.
NIP 196307171988032001**

**DIBIYAI OLEH
PNBP FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2016**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Analisis Yuridis terhadap Tugas BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada BUMN
b. Bidang Ilmu : Hukum Administrasi Negara/Hukum Keuangan Negara, Hukum Pidana
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : HennyJuliani, S.H. M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. Golongan/Pangkat/NIP : IVB/Pembina Tingkat I/ 196307171988032001
 - d. Jabatan/Fungsional : Lektor Kepala
 - e. Bagian : Hukum Administrasi Negara
3. Jumlah Anggota Peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : Kota Semarang
5. Lama Penelitian : 3 (tiga) bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Semarang, Oktober 2016
Ketua Peneliti,

Prof. Dr. R. Benny Riyanto, S.H. C.N. M.Hum.
NIP.1962041019870310003

Henny Juliani, S.H. M.H.
NIP: 196307171988032001

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat karunia yang telah diberikanNya, sehingga laporan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Tugas BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada BUMN” dapat terselesaikan. Laporan penelitian ini diajukan dan disusun guna memenuhi persyaratan dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang penelitian.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Diponegoro;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
3. Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini;

Akhir kata dengan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik dan bagi penulisan-penulisan hukum selanjutnya.

Semarang, Oktober 2016

Peneliti

ABSTRAK

BUMN yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional. Pengelolaan/pengurusan BUMN tidak bisa dilepaskan dari peranan direksi, karena direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMN. Berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab BUMN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, maka BPK mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian dengan judul: “Analisis Yuridis terhadap Tugas BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada BUMN.”

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder di bidang hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada hakikatnya BUMN yang seluruh atau sebagian besar sahamnya (51 %) merupakan milik negara merupakan kepanjangan tangan negara dalam menjalankan sebagian fungsi negara untuk mencapai tujuan negara. Kekayaan negara tersebut telah bertransformasi menjadi modal BUMN yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN yang terlepas dari kekayaan negara. Akibatnya tidak terjadi transformasi hukum publik ke hukum privat. Dalam melakukan pengelolaan BUMN, Direksi dipadankan dengan penyelenggara negara (pejabat negara) yang menjalankan fungsi strategis. Dalam memimpin dan mengurus BUMN, Direksi dapat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, oleh karena itu BPK sebagai badan pengawas keuangan menjalankan tugas dan wewenang pemeriksaan termasuk kepada BUMN. Pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan memuat opini, laporan hasil pemeriksaan BPK atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Sedangkan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan. Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD dan sekaligus disampaikan pulakepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan BPK tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci:BPK, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BUMN.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Negara	10
B. Kedudukan Hukum BUMN dalam Pengelolaan Keuangan Negara	16
C. Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara.....	23
BAB III TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN	29
A. Tujuan Penelitian	29
B. Manfaat Penelitian	29
BAB IV METODA PENELITIAN	30
A. Metoda Pendekatan	30
B. Spesifikasi Penelitian	30
C. Jenis dan Sumber Data.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data	32

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Tugas dan Wewenang BPK dalam Melaksanakan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	33
B. Analisis Yuridis terhadap Tugas BPK dalam Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada BUMN.....	48
BAB VI PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65